

Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menerapkan *Good Governance* Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Effectiveness of Implementing the Performance Accountability System for Government Agencies in Implementing Good Governance at the Regional Health Service of North Sulawesi Province

Ignatius Koyongian¹, Harijanto Sabijono²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

Correspondence

Email: ignatiuskoyongian064@student.unsrat.ac.id,
h_sabijono@unsrat.ac.id

No. Telp:

Submitted: 28 October 2024

Accepted: 6 November 2024

Published: 7 November 2024

ABSTRAK

Otonomi daerah dibutuhkan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam hal memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar bisa terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sektor publik. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari dimensi pencapaian tujuan, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang telah dibuat pada instansi ini mampu mewujudkan *good governance* pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan 3) untuk mengetahui efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari dimensi adaptasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tentang *good governance*.

Kata kunci: Efektivitas, Sistem Akuntabilitas, Kinerja

ABSTRACT

Regional autonomy is needed to improve the performance of regional government in terms of providing the best service to the community by using existing laws and regulations so that good governance can be realized. The realization of good governance is a form of obligation that must be carried out by the public sector. The objectives of this research are 1) to determine the effectiveness of the government agency performance accountability system at the North Sulawesi Provincial Health Service from the dimension of goal achievement, 2) To find out and analyze whether the government agency accountability system that has been created at this agency is able to realize good governance at the Department. North Sulawesi Province Regional Health, and 3) to determine the effectiveness of the government agency performance accountability system (SAKIP) at the North Sulawesi Province Regional Health Service, North Sulawesi Province seen from the adaptation dimension. The type of research used in this research is qualitative. The results of this research indicate that the Regional Health Service of North Sulawesi Province has implemented a government agency performance accountability system regarding good governance.

Keywords: Effectiveness, Accountability System, Performance

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dibutuhkan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan menggunakan peraturan

perundang-undangan yang sudah ada agar dapat bisa terwujud pemerintahan yang baik (good governance). Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sektor publik. Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Dalam instruksi presiden No. 7 Tahun 1999 yaitu tentang akuntabilitas instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah harus mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan berdasarkan peraturan presiden No.29 Tahun 2014 perihal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari berbagai aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem pengukuran dan sistem pelaporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yaitu, menjadi alat memperbaiki kebijakan dan mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan inovasi dalam mendisain acara serta aktivitas. Selanjutnya, SAKIP akan berguna bagi seorang pimpinan atau kepala daerah untuk menilai setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi pemerintahan yang memberikan layanan publik untuk masyarakat sudah selayaknya memberikan kinerja yang baik. Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana instansi pemerintahan, melaporkan kinerja apa saja yang sudah dilakukannya pada menyampaikan pelayanan publik kepada rakyat. Proses evaluasi ini dilakukan secara terukur sebagai akibatnya dapat dijadikan bagian dari proses sistematis pembelajaran bagi instansi pemerintah agar terus menaikkan kualitas kelembagaannya sehingga berdampak pada meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul “Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”

1.1. Akuntansi

Akuntansi yaitu sebuah kegiatan untuk mengukur kinerja entitas pada suatu Perusahaan yang dapat memberikan hasil akhir berupa sebuah informasi kepada pihak penggunanya. Harus disadari bahwa akuntansi memiliki peranan yang penting untuk kegiatan ekonomi. Tanpa adanya akuntansi, kegiatan ekonomi akan cenderung berjalan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan atau dari pihak pemilik tidak dapat mengetahui seberapa biaya operasional atau produksi yang dikeluarkan, omset atau laba pada perusahaan berapa tiap bulan ataupun tahun, dan juga bisa terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan dari karyawan perusahaan apabila tidak adanya akuntansi ini.

1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam Pasal 5 pada Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan.
2. Perjanjian Kinerja
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksana anggaran. Dokumen pelaksana anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Pengolaan data Kinerja
Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengelolah dan melaporkan data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
6. Reviu Dan Evaluasi Kinerja
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. dituangkan dalam pernyataan telah di reviu dan ditanda tangani

1.3 Efektivitas

Menurut Hasibuan dalam (Ratih dkk., 2020) yaitu efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar dapat menjamin suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumber daya manusia.

1.4 Tata Kelola *Good Governance*

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "Governance for Sustainable human development" (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sector swasta dan society (Dwiyanto, 2005: 82). Pengertian *governance* menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003: 5) terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1. *Political Governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation).
2. *Economic Governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), proverty (properti), serta quality of life

(kualitas hidup)

3. *Administrative Governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

1.5 **Komponen Penilaian SAKIP**

Komponen Bobot Sub komponen

1. Perencanaan kinerja 30% Rencana Strategis (10%) meliputi: pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%)
Perencanaan Kinerja Tahun (20%),
meliputi pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT(10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja 25% Pemenuhan pengukuran (5%)
Kualitas pengukuran (12,5%)
Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan pelaporan (3%)
Kualiatas pelaporan (7,5%)
Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal 10% Pemenuhan evaluasi (2%)
Kualitas evaluasi (5%)
Pemanfaatan pelaporan (3%)
5. Capaian Kinerja 20% Kinerja yang dilaporkan (output) (4%)
Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)

METODE PENELITIAN

2.1 **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2.2 **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. 17 Agustus No.87-11, Teling atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.

2.3 **Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

2.3.1 **Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah berupa data kualitatif, Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata seperti kata-kata lisan maupun tulisan.

2.3.2 **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau pihak pertama. Data Sekunder yaitu jenis data yang digunakan sebagai pendukung data pokok atau data utama dan dijadikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi data tambahan.

2.3.3 **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

2.4 **Metode dan Proses Analisis**

2.4.1 **Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Kesehatan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara.

2.4.2 Proses Analisis Data

Proses data berasal dari data sekunder berupa Pedoman Penyusunan LAKIP dan laporan berupa LAKIP periode tertentu dari masing-masing objek yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara secara detail dan mendalam dari masing-masing tim penyusunan SAKIP dan LAKIP. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan dalam penyusunan LAKIP. Setelah mendapatkan informasi dan data yang lengkap maka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Rencana Strategis

Hasil Evaluasi yang dicapai untuk Perencanaan Kinerja adalah “27,81” dari nilai maksimal “30”. Hal tersebut tampak dari evaluasi pemenuhan RENSTRA, Kualitas RENSTRA serta implementasi belum semua tujuan dalam renstra terkait dengan isu strategis organisasi ;

1. Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
2. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyusunan kinerja eselon III dan IV

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempretasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan bersama oleh PNS pelaksana dengan Atasan Langsung untuk mewujudkan target Kinerja dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 2021.

3. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi yang dicapai untuk Pengukuran Kinerja adalah “20,31” dari nilai maksimal “25”. Hal tersebut tampak dari Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mulai dari pemenuhan pengukuran kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, dengan hasil antarlain:

1. Ukuran (indikator) kinerja individu telah mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.
2. Pengukuran Kinerja telah sepenuhnya dilakukan secara berjenjang.
3. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena sudah ada dokumentasi metode pengumpulan data kinerja.
4. IKU telah sepenuhnya dimanfaatkan pada dokumen penganggaran dikarenakan belum dijadikannya alat ukur tercapainya outcome atau hasil- hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DPA).
5. IKU sudah dipublikasikan.

4. Pencapaian Kinerja

Hasil Evaluasi yang dicapai untuk Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi adalah sebesar “16,24” dari nilai maksimal 20. Hal ini tampak pada hasil Kinerja yang dilaporkan (output) dan (outcome) dimana hamper semua target dapat tercapai, namun informasi mengenai capaian kinerja sudah sepenuhnya dapat diandalkan dan diverifikasi serta ditelusuri sumbernya.

5. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi yang dicapai untuk Pelaporan kinerja adalah “13,56” (tiga belas

koma lima enam) dari nilai maksimal “15” (lima belas). Hal tersebut tampak dari evaluasi atas Pelaporan Kinerja mulai dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja, dengan hasil antara lain:

1. Laporan kinerja telah dipublikasikan atau di upload kedalam website
2. Dalam penyusunan Laporan Kinerja telah sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian IKU dengan mengacu pada kriteria IKU yang baik yaitu SMART.
3. Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
4. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Informasi yang disajikan telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dalam meningkatkan kinerja.

6. Evaluasi Internal

Hasil Evaluasi yang dicapai untuk Evaluasi Internal adalah “6,85” (enam koma delapan lima) dari nilai maksimal “10” (sepuluh). Hal tersebut tampak dari Evaluasi atas Evaluasi Internal yang terdiri dari pemenuhan evaluasi atas Evaluasi Internal yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi, dengan hasil antara lain:

1. Hasil evaluasi sudah sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkemampuan.
2. Pemanfaatan Evaluasi sudah sepenuhnya dilaksanakan
3. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan secara tepat waktu.
4. Rencana Aksi belum dilaksanakan secara pemantauan semester dan tahunan

3.2 Pembahasan

Berikut adalah tabel komponen penilaian SAKIP pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,18
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,31
3.	Pencapaian Kinerja	20	16,24
4.	Pelaporan Kinerja	15	13,56
5.	Evaluasi Internal	10	6,85
	TOTAL	100	84,14

1 Perencanaan Kinerja

Hasil pembahasan pada perencanaan kinerja dapat kita simpulkan bahwa rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan sudah sesuai indikator namun ada beberapa indikator yang belum sesuai perencanaan yaitu perbandingan kinerja belum sepenuhnya digunakan namun hal tersebut tidak terlalu berdampak dalam kinerja karyawan dikarenakan ada beberapa indikator yang sudah sesuai. Hasil Evaluasi yang dicapai untuk Perencanaan Kinerja adalah “27,81” dari nilai maksimal “30”

2 Pengukuran Kinerja

Ukuran indikator kinerja pada Dinas Kesehatan sudah mengacu pada unit kerja atasan

dan juga telah dilakukan secara berjenjang. Dapat kita simpulkan bahwa pengukuran kinerja pada Dinas Kesehatan mulai dari pemenuhan pengukuran kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan hasil evaluasi pengukuran kinerja “20,31”

3 Pencapaian Kinerja

Dapat kita simpulkan bahwa capaian Kinerja pada organisasi Dinas Kesehatan dengan hasil kinerja yang sudah dapat diandalkan dimana hampir semua target sudah dapat tercapai dan diverifikasi serta ditelusuri sumbernya. Hasil evaluasi yang dicapai untuk capaian kinerja yaitu “16,24”

4 Pelaporan Kinerja

Dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara telah dapat merealisasikan program serta kegiatan tahun dalam RENSTRA ada 3 Indikator yang mencapai kinerja berhasil namun ada 2 indikator yang tidak berhasil dikarenakan pandemic global sehingga ada beberapa kegiatan yang terbatas dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dicapai yaitu “13,56”

5 Evaluasi Internal

Dapat dilihat dari evaluasi atas evaluasi internal bahwa hasil evaluasi sudah sepenuhnya disampaikan kepada yang berkepentingan serta pemanfaatan evaluasi sudah dilaksanakan namun pemantauan dan rencana aksi belum dilaksanakan tepat waktu. Hasil evaluasi dengan nilai “6,85”

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat kita lihat dari Komponen Penilaian SAKIP pada Dinas Kesehatan sudah bisa dikatakan efektif dengan evaluasi nilai yang di capai.

Integrasi Pengukuran kinerja dalam melaksanakan sosialisasi biasanya sudah berjalan dengan bagian-bagian yang terkait terutama di ikuti oleh perangkat-perangkat yang menyelenggarakan SAKIP, tetapi untuk sekarang di karenakan adanya social distance/pandemi ada beberapa kegiatan yang terbatas sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Adaptasi Hasil evaluasi yang dilakukan dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa zaman telah berubah dari tahun ke tahun Dinas Kesehatan sudah sangat beradaptasi dengan baik dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana sudah sangat cukup memadai dari segi IT koneksi sudah cukup baik dan lancar serta peningkatan sumber daya manusia. Namun ada beberapa kendala yang menjadi kegiatan kerja terhambat di karenakan sering terjadinya pemadaman listrik. dilihat dari dimensi adaptasi bahwa pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah efektif.

Saran

Saran untuk Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan penulisan pada laporan-laporan harap lebih teliti dan di perhatikan lagi karena ada beberapa tulisan yang di tulis dalam laporan telah salah dalam pengetikan dan juga harus sediakan generator set karena jika terjadi pemadaman listrik proses kegiatan kerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kehambatan dalam proses peninputan data dan kegiatan kerja karyawan terhambat.

Untuk Masyarakat Diharapkan Kedepannya Jika ada masalah mengenai kesehatan khususnya untuk ibu hamil harap di konsultasikan ke instansi kesehatan terdekat atau puskesmas agar supaya bisa mengetahui dan lebih paham mengenai masalah kesehatan ibu hamil.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis sebaiknya agar memperkuat penelitian ini dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah sesuai tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diperkuat lagi dengan peraturan-pertaruan yang terbaru mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daftar Pustaka

- Nursamah, 2018. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok: LAKIP dan Penilaian SAKIP Tolak Ukur Kinerja PNS. 13 Januari 2022 (22.49).
- Tambayong, M. H, Ilat, V dan Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. 20 April 2024 (14.1).
- Wokas, H. R. N dan Gerungan, N. Y. T. (2019). The Influence of Budgeting Based On Performance On the Effectiveness of Financial Control and the Effectiveness of Performance Control at Tomohon Citu Government. 20 April 2024. (8.1)
- Muh. Irfandy Azis. (2020) Application Of Accountability Performance Of Government Institution (SAKIP) In Gunung Kidul Government 1 Januari 2020. (11.1)
- Putri L. dan Permata K. (2020) Analyze Of The Practice Of Good Good Governance Through Implementation Of The Accountability System Performance Government Agencies (SAKIP) On The State Sleman District 4 Oktober 2020. (2.4)
- Patrycia T. dan David P.E Saerang (2020) Analisis Penyajian Informasi Kinerja Dalam Rangka Implementasi SAKIP Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 2 Februari 2020. (15.2)
- Eka Puspasari (2016) Efektivitas Ssistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. (1.3)
- Fredelince L.N, Hyronimus Lowa dan Ani Martini (2021) The Effectiveness Of The Performance Accountability System Government Institution In East Sumba District 1 Juli 2021. (6.1)
- Ati Rosliyati (2014) Pengaruh Implementasi SAKIP Terhadap Penerapan Good Governance 2 Maret 2014. (2.1)
- Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.
- Dwi Pratiwi dan Rita Nataliawati (2021) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan 14 Desember 2021 (38.02) 50
- S. Faradima, S. Muchsin dan Hayat (2021) Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang Juni 2021 (2.1)
- Nagara R.F. dan Anessa Musfitria (2022) Analisis Efektivitas pada Pengelolaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah di MI At-Taqwah Cijeruk (3.3)
- Siti Maryam (2020) Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Wajo 5 Mei 2020. (1.2)
- Farhansyah, J.(2021). Akuntabilitas adalah Pengertian, Fungsi, dan Contoh dalam Bisnis (21.27).
- Sedarmayanti (2006). Jurnal Administrasi Publik UNDP Good Governance Tata

Kelola

- Prawiro, M. 2020. Maxmanroe: Pengertian Kinerja Indikator, dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja. 13 Januari 2022 (21.40).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 21 April 2014. Peraturan BPK. Jakarta.
- Prokomosetda, A. (2017). Prokomosetda Buleleng: Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. 13 Januari 2022 (22.25).
- Andi M. Monalisa, Muhllis Madani dan Nurbiah Tahir (2020) Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Agustus 2020. (3.4)
- Ricky Mukaromah dan Nuwun Priyono (2021) Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. 29 Maret 2021 (3.1)
- Yunita Christy, Sinta Setiana dan Puput Cintia (2020) Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) November 2017 (9.2)
- Silvi Pratiwi dan S.Martono (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perguruan Tinggi Negeri. 2022 (2.2)